

PERAN PEMDA DAN DPRD DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id

HP: 081 328 488 444

Kabupaten Kuningan



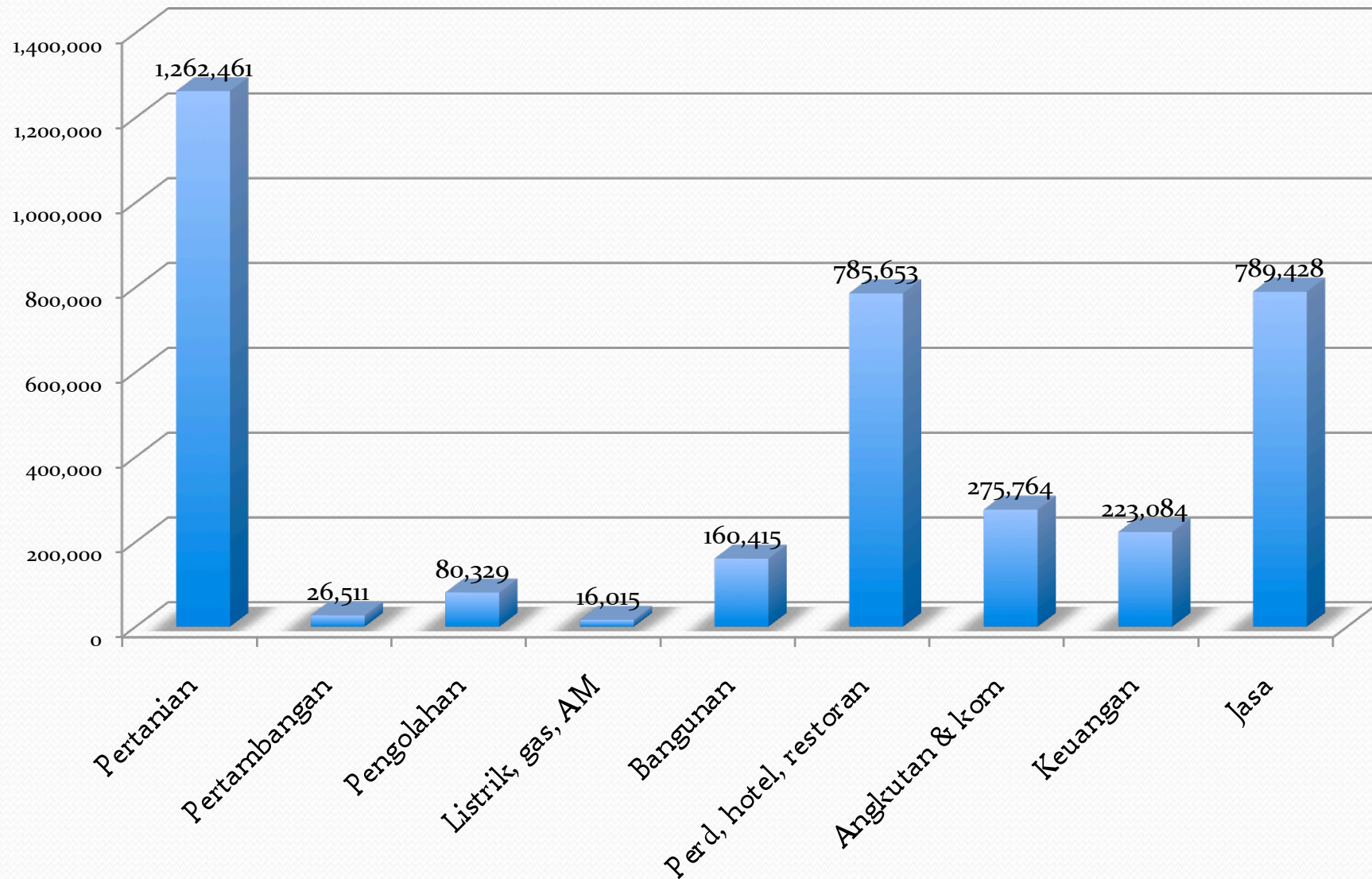
Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PERGESERAN POLITIK PENGANGGARAN DAERAH

1. Peran bujeter DPRD sedang mencari bentuk (dari “self-financing” ke “external control”?)
 2. PDRB per kapita meningkat, tetapi horizontal imbalance juga bertambah parah (DAU lebih bernuansa politis)
- ❧ Peningkatan tax effort diantara Pemda Kabupaten/Kota (Masalah: bagaimana daerah memahami kaitannya dengan investasi)
 - ❧ Tabungan daerah meningkat (Lewis, 2004). APBN defisit (Rp 61,9 T) tetapi APBD surplus (Rp 43 T), belanja kurang efektif (Depkeu, 2009)
 - ❧ Pada tingkat lokal, pemahaman mengenai kaitan antara anggaran dan pelayanan dasar masih sangat rendah.

Gambar 1. Kontribusi Sektoral PDRB Kab Kuningan Th 2008 (Rp jutaan)



Tabel 1. APBD Kab Kuningan 2010 (Rp juta)

Uraian	Anggaran	% dari Belanja
PENDAPATAN	957,575	94.82
Pendapatan Asli Daerah	70,927	7.02
Hasil Pajak Daerah	10,849	1.07
Hasil Retribusi Daerah	51,528	5.10
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,289	0.23
Lain-lain PAD yang Sah	6,261	0.62
Dana Perimbangan	794,624	78.69
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	56,495	5.59
Dana Alokasi Umum	660,391	65.39
Dana Alokasi Khusus	77,738	7.70
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	92,024	9.11
BELANJA	1,009,871	100.00
Belanja Tidak Langsung	767,546	76.00
Belanja Pegawai	689,855	68.31
Bantuan Sosial	7,717	0.76
Bantuan Pemerintahan Desa	30,645	3.03
Belanja Tidak Terduga	3,117	0.31
Belanja Langsung	242,326	24.00
Belanja Pegawai	19,805	1.96
Belanja Barang dan Jasa	113,839	11.27
Belanja Modal	108,681	10.76

Struktur Belanja APBD 2008

Total belanja langsung	: Rp 232,816 miliar
Program dan kegiatan non-urusan	: Rp 57,42 miliar
Pendanaan fisik DAK	: Rp 64,71 miliar
Bantuan keuangan	: Rp 10 miliar
Pendampingan kegiatan	: Rp 15,91 miliar
Penanggulangan bencana	: Rp 1 miliar
Kegiatan sesuai urusan	: Rp 83,75 miliar.

Catatan:

Apakah kegiatan sesuai urusan SKPD telah sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat?

Gambar 2. Rekap Belanja Langsung Kab Kuningan 2009

PROGRAM KEGIATAN	U R U S A N		JUMLAH
	W A J I B	P I L I H A N	Σ
NON URUSAN	188	6	194
	1043	35	1078
URUSAN	86	15	101
	308	35	343
JUMLAH Σ	274	21	295
	1351	70	1421

Sumber: LKPJ 2009

Tabel 2. Alokasi Belanja Urusan Wajib Th 2009

No.	SKPD	Realisasi Anggaran (Rp)	Proporsi (% Total Belanja)	Teralokasi (%)
1	Disdikpora	49,645,900,929	34.18	99.95
2	Dinkes	25,756,205,071	17.73	87.34
3	PU (Bina Marga, TR, Cipta Karya)	41,984,774,936	28.90	82.53
4	Dishub	467,436,200	0.32	77.25
5	Bapedalda	573,013,000	0.39	99.65
6	Badan Pertanahan	567,098,000	0.39	100.00
7	Disdukcapil	1,279,228,591	0.88	92.19
8	BKB & Pemberdayaan	1,587,832,000	1.09	100.00
9	Dinsos	150,000,000	0.10	100.00
10	Disnaker	0	0.00	0.00
11	Diskop & UMKM	177,175,000	0.12	97.08
12	BPMD / BPPT	129,900,000	0.09	99.92
13	Disbud	192,735,000	0.13	98.84
14	Kesbangpol	1,297,700,000	0.89	83.83
15	Setda (PUM)	13,574,701,000	9.35	83.31
16	Ketahanan pangan (Distanakkan)	709,977,555	0.49	97.50
17	PMD	6,369,483,000	4.39	99.45
18	Statistik	0	0.00	0.00
19	Kearsipan	50,000,000	0.03	100.00
20	Kominfo	692,009,500	0.48	97.53
21	Perpustakaan	50,000,000	0.03	100.00
	Total urusan wajib	145,255,169,782	100.00	

Tabel 3. Alokasi Belanja Urusan Pilihan Th 2009

No.	SKPD	Realisasi Anggaran (Rp)	Proporsi (% Total Belanja Langsung)	Teralokasi (%)
1	Pertanian	1,286,986,300	0.53	84.64
2	Kehutanan	501,700,000	0.21	99.00
3	ESDM	253,722,000	0.10	99.50
4	Pariwisata	156,541,000	0.06	99.57
5	Kelautan & perikanan	98,410,000	0.04	98.41
6	Perdagangan	841,752,000	0.35	99.03
7	Transmigrasi	0	0.00	0.00
	Total belanja urusan pilihan	3,139,111,300		
	Total belanja langsung APBD	242,326,000,000		

Catatan:

Apakah belanja langsung untuk SKPD terkait sektor unggulan di Kab Kuningan sudah proporsional?

Tantangan Belanja Tidak Langsung

1. Kenaikan gaji PNS
2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
3. Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Jawa Barat
4. Kenaikan Alokasi Dana Desa


Tabel 2. Produk Perda Kab Kuningan Tahun 2010

No.	Tentang
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010
2	Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
4	Pengelolaan Sampah
5	Kendaraan Tidak Bermotor
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan
7	Ketentuan Ijin Usaha dibidang Kesehatan
8	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
9	Pembentukan OTK Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
10	Pengelolaan Barang Milik Daerah
11	Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)
12	Pedoman Pembentukan Peraturan daerah
13	Perubahan atas Perda No. 5/2009 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Kuningan
14	Perubahan APBD Kab Kuningan Tahun 2010
15	Pajak Daerah
16	Perizinan Tertentu
17	Izin Trayek
18	Pengendalian Menara Telekomunikasi
19	Pengujian Kendaran Bermotor
20	Retribusi Terminal
21	Pemakaian Kekayaan daerah
22	Perubahan atas Perda No.18/2008 ttg Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM
23	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Kuningan TA 2010
24	Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
25	Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta Raharja
26	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman Ketertiban Umum

Catatan: Apakah program legislasi sesuai kebutuhan rakyat?

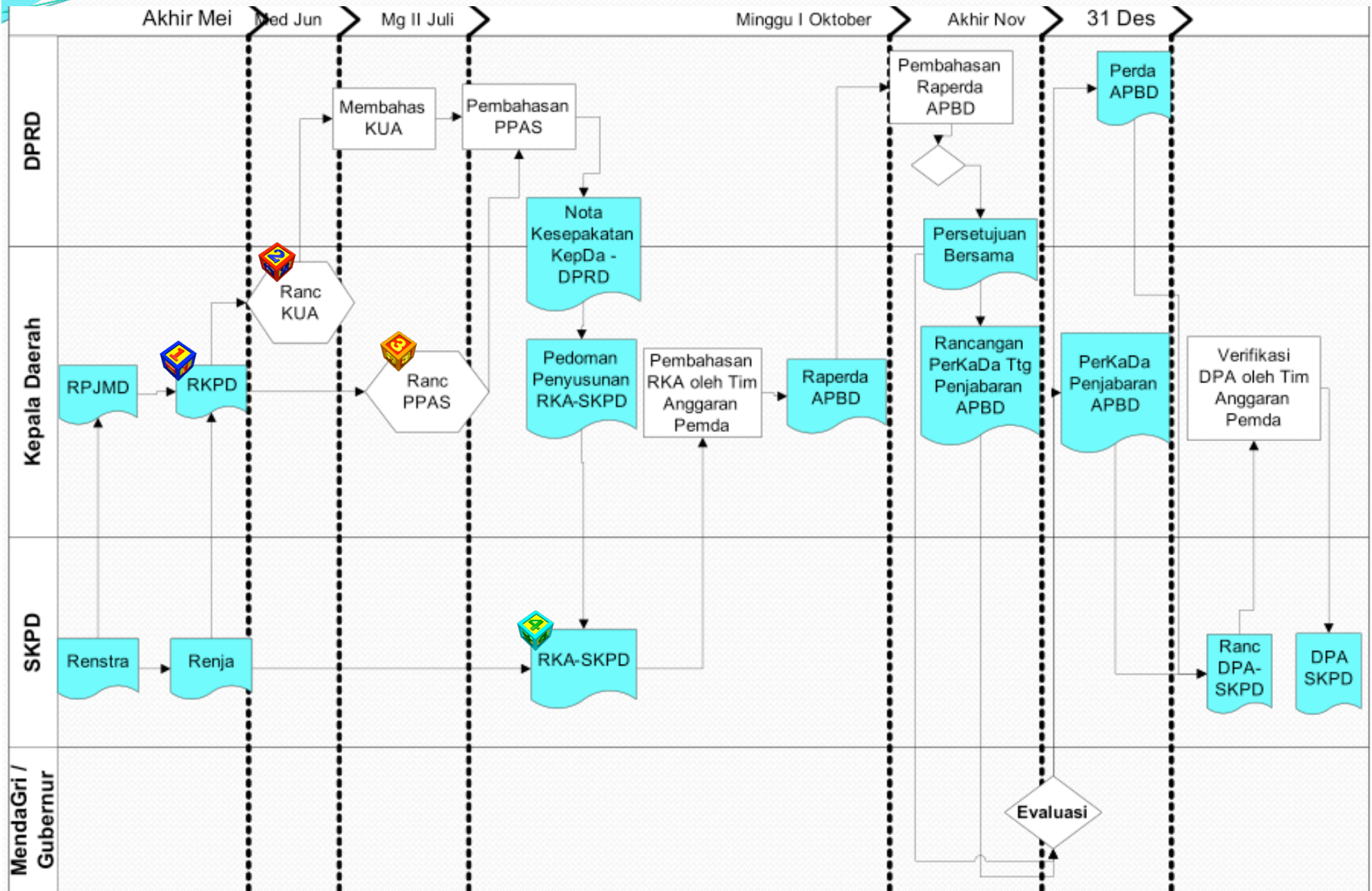
Analisis Kepentingan Stakeholders

- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.

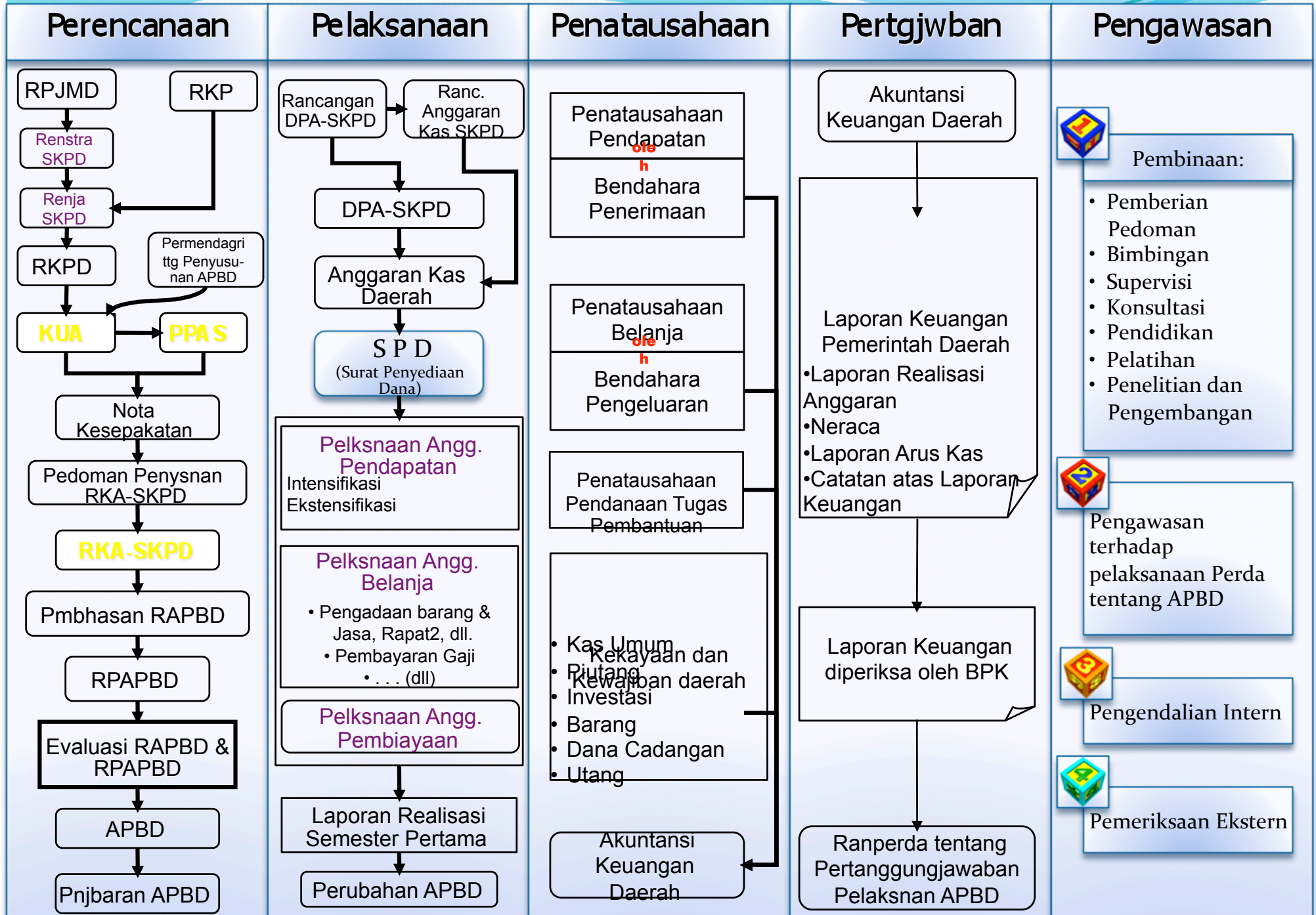


Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

JADWAL PENYUSUNAN APBD



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



MASALAH-MASALAH KRUSIAL DALAM PEMBAHASAN RAPBD DAN LKPJ

1. **KONSISTENSI ANTARA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN YG ADA DLM RAPBD DGN KUA YG DISEPAKATI DPRD DAN EKSEKUTIF.**

Kebijakan Umum APBD berisi Prioritas Program dan Patokan-Patokan sebagai Pagu Sementara penggunaan dana dlm APBD krn memang blm detail. Dlm LKPJ dpt dicek jangan sampai kegiatan diubah bentuk maupun anggarannya.

2. **SASARAN CAPAIAN PROGRAM HARUS TERJABARKAN DLM ‘KEGIATAN-KEGIATAN’ SHG JELAS BHW SELURUH KEGIATAN ITU MENUJU PD SATU SASARAN YG TLH DITETAPKAN (KUA).**

Sering terjadi tidak sambung antara “NAMA PROGRAM” dgn “KEGIATAN-KEGIATAN” Penjabarannya, yakni dgn mengecek “input”/masukan dana/SDM, “output”/keluaran ujud kegiatan dan “outcome”/hasil. LKPJ melihat capaian kinerjanya.

Lanjutan....

3. **PENGANGGARAN DANA BANTUAN SOSIAL HARUS ADA PENJABARANNYA MINIMAL SCR GARIS BESARNYA.**
Tugas Panitia Anggaran untuk menanyakan hal ini pd eksekutif. LKPJ harus melampirkan sasaran dan alokasi dana bantuan sosial kpd masyarakat sehingga tidak ada perulangan tiap tahun ataupun dominasi oleh kelompok tertentu.

4. **KETAATAN PADA PENGGUNAAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA YG TELAH DITETAPKAN OLEH BUPATI.**
Selain melebihi jumlah kebutuhan alat-alat tulis kantor seperti Flash Disk, kertas, fotocopy, biaya cetak dll, biasanya beberapa SKPD jg menggunakan harga yg berbeda-beda untuk satu jenis barangnya. LKPJ dapat dipakai sbg ukuran keseriusan dlm efisiensi anggaran.

5. Pastikan bahwa anggaran yg berdampak langsung kpd masyarakat memperoleh porsi yg memadai dlm APBD: pendidikan, pertanian, UMKM, pengamanan sumber air, kesehatan dan infra struktur lebih besar drpd belanja pegawai.

Pemerintahan yg sukses dimata rakyat sangat sederhana kriterianya, yakni apabila dpt meningkatkan kesejahteraan mereka. Sejahtera bagi rakyat jg sangat sederhana ukurannya yakni hanya 3 sj : Otak Pintar, Badan Sehat dan Kantong Tebal. Yg lainnya akan dilupakan. LKPJ sebagai sarana untuk mengecek apakah eksekutif telah mencapai target kinerja secara keseluruhan atau belum, sbg bahan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja di masa depan.

Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud “menyembunyikan” pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur dlm Peraturan. Mis: PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. Mark-up (penggelembungan) anggaran
 - Alokasi anggaran kembar
 - Anggaran tanpa rincian
 - Menghilangkan pos anggaran
 - Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang cash.

Sumber: ICW, 2007

Catatan ttg APBD & Pembangunan di Kuningan

1. Fokus pembangunan adl “pertanian dan pariwisata” (RPJMD 2009-2013). “Ngokolakeun sumberdaya alam jeung manusa, nanjeurkeun kaunggulan lokal”. Tetapi proporsi belanja langsung dua sektor ini masih kurang dari 2%?
2. Sektor agribisnis sangat potensial, tetapi pengembangannya terbentur kemandirian petani, teknologi, instabilitas Saprodi, kekurangan pupuk organik, dan tidak adanya lumbung
3. Pariwisata termasuk sektor unggulan. Ripda (Perda No.7/2009 belum dilaksanakan secara konsisten).
4. Ketergantungan penerimaan daerah kepada subsidi Pemerintah Pusat (PAD hanya 7,02 % dari total Belanja).
5. Daya serap rendah; TA 2010, hingga November 2010 baru terserap 62 persen.
6. Perlu perhatian lebih besar kepada pembiayaan infrastruktur (jalan, jembatan, telekomunikasi). Mis: Terminal Tipe A Kertawangun.
7. Kualitas SDM masih rendah (49,78% lulus SD).

PENUTUP

Fungsi pokok DPRD dalam penyusunan APBD adalah pada perencanaan, penentuan prioritas, dan pengawasan.

Bagaimana supaya anggaran bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan layanan publik? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

SEKIAN